



PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH STUNTING DI LEMBANG SA'DAN ULUSALU, KECAMATAN SA'DAN, KABUPATEN TORAJA UTARA

Nini Wastini¹, Jericho D Pombengi², Novie R A Palar³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available online Januari, 2026

niniwastini76@gmail.com,

jdombengi@gmail.com,

noviepalar@unsrat.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan lintas sektor. Tingginya prevalensi stunting di Lembang Sa'dan Uluusalu, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara menunjukkan perlunya pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di tingkat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemerintah lembang, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen antarpemangku kepentingan. Pemerintah lembang berperan sebagai fasilitator, sedangkan tenaga kesehatan dan kader posyandu menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program. Namun, kolaborasi belum optimal akibat keterbatasan intensitas koordinasi, perbedaan pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber

daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kader, dan edukasi masyarakat berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan stunting di tingkat desa.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Pencegahan Stunting; Pemerintah Desa

ABSTRACT

Stunting is a public health problem that requires cross-sectoral collaboration. The high prevalence of stunting in Sa'dan Uluusalu Village, North Toraja Regency highlights the importance of a collaborative governance approach. This study aims to analyze the process of collaborative governance in stunting prevention at the village level. This qualitative descriptive study employed in-depth interviews, observation, and documentation involving village government officials, health workers, posyandu cadres, and community members.

The findings indicate that collaboration has been implemented through face-to-face dialogue, trust-building, and stakeholder commitment. The village government acts as a facilitator, while health workers and posyandu cadres play key roles in program implementation. However, collaboration has not been fully optimized due to limited coordination intensity, differing community perceptions, and resource constraints. Strengthening cross-sectoral coordination, enhancing cadre capacity, and continuous community education are essential to improve the effectiveness of stunting prevention.

Keywords: Collaborative Governance; Stunting Prevention; Village Government



1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang memiliki implikasi luas terhadap pembangunan sumber daya manusia. Kondisi ini ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pembangunan ekonomi jangka panjang (Yuwanti et al., 2021). Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar, serta produktivitas pada usia dewasa.

Secara global, stunting masih menjadi isu kesehatan yang serius. Organisasi Kesehatan Dunia menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 40 persen, mengingat tingginya jumlah anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, khususnya di negara berkembang. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi, sehingga pemerintah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kebijakan ini menekankan pentingnya intervensi terpadu dan kolaboratif lintas sektor, karena penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial.

Di tingkat daerah, permasalahan stunting juga menjadi tantangan serius, termasuk di Kabupaten Toraja Utara. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta sistem EPPGBM-SKI menunjukkan bahwa jumlah kasus stunting masih tergolong tinggi, dengan Kecamatan Sa'dan sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi tertinggi. Lembang Sa'dan Ulusal tercatat memiliki sekitar 30 persen balita stunting dari total balita yang ada. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional dan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam pemenuhan gizi, akses layanan kesehatan, serta pola pengasuhan anak di tingkat keluarga dan masyarakat.

Permasalahan stunting pada dasarnya bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, sanitasi, serta tata kelola pemerintahan turut memengaruhi keberhasilan upaya pencegahan stunting (Anwar et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan sumber daya dalam satu kerangka kerja yang sinergis. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan kolaboratif.

Pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan dalam konteks pencegahan stunting. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara langsung melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pembagian peran yang jelas, pertukaran informasi yang terbuka, serta penguatan komitmen bersama dalam menangani masalah publik yang kompleks, termasuk stunting.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, *collaborative governance* dipandang mampu meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan akurasi data, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan (Afrida et al., 2024). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi sering menghadapi kendala, seperti perbedaan kepentingan antaraktor, keterbatasan kapasitas kader, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait gizi dan kesehatan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi program pencegahan stunting di berbagai daerah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pelaksanaan program kesehatan atau intervensi gizi secara sektoral (Tirayoh et al., 2023). Kajian yang secara khusus



menganalisis proses *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di tingkat desa, dengan memperhatikan dinamika interaksi aktor dan konteks lokal, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sosial dan budaya masyarakat desa sangat memengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di Lembang Sa'dan Ulusalu, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini berfokus pada dinamika kolaborasi antarpemangku kepentingan, meliputi pemerintah lembang, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola kolaboratif dalam pencegahan stunting di tingkat lokal, sekaligus memperkaya kajian administrasi publik di bidang kesehatan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses *collaborative governance* dalam pencegahan stunting, khususnya dinamika interaksi antaraktor, peran masing-masing pihak, serta mekanisme kolaborasi yang berlangsung di tingkat lokal. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan faktual sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan (Moleong, 2017; Sugiyono, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Lembang Sa'dan Ulusalu, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu lokus dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi serta menjadi sasaran pelaksanaan berbagai program pencegahan stunting. Pemilihan lokasi secara purposif lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2016).

Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat pemerintah lembang, tenaga kesehatan dari puskesmas, kader posyandu, serta masyarakat yang memiliki balita stunting. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam dari informan yang benar-benar memahami proses pencegahan stunting di wilayah penelitian (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai peran aktor, bentuk koordinasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses kolaborasi pencegahan stunting. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan kegiatan posyandu, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan kegiatan, data stunting, serta dokumen kebijakan yang relevan. Kombinasi teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola kolaborasi yang terjadi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian



berlangsung guna memastikan konsistensi dan kedalaman temuan penelitian (Miles & Huberman, 2014).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh (Moleong, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pencegahan stunting di Lembang Sa'dan Ulusalu merupakan respons atas tingginya prevalensi balita stunting yang masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah lembang untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan sektoral, tetapi melibatkan berbagai aktor lintas sektor melalui mekanisme *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terbentuk dan berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh dinamika proses, kapasitas aktor, serta karakteristik sosial masyarakat setempat.

Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dialog tatap muka menjadi fondasi awal dalam proses *collaborative governance*. Di Lembang Sa'dan Ulusalu, dialog dilakukan melalui rapat koordinasi lembang, pertemuan lintas sektor, musyawarah masyarakat, serta kegiatan rutin posyandu. Forum-forum ini dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi, perencanaan kegiatan, dan evaluasi program pencegahan stunting.

Hasil wawancara dengan aparat pemerintah lembang menunjukkan bahwa dialog dilakukan untuk menyamakan persepsi antaraktor terkait urgensi stunting dan pembagian peran masing-masing pihak. Aparat lembang (AP1) menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mengundang tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam setiap pertemuan untuk memastikan program yang dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka telah menjadi instrumen awal kolaborasi, sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash (2008) bahwa interaksi langsung antarpemangku kepentingan merupakan prasyarat utama terbentuknya kolaborasi yang efektif.

Namun demikian, dialog tatap muka belum berlangsung secara intensif dan berkelanjutan. Pertemuan umumnya bersifat insidental dan bergantung pada agenda program tertentu. Tenaga kesehatan (TK1) mengungkapkan bahwa koordinasi sering kali dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan, bukan sebagai proses yang terstruktur dan rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa dialog belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang deliberatif untuk membangun kesepahaman jangka panjang, sehingga berdampak pada keterbatasan kualitas kolaborasi.

Partisipasi masyarakat dalam dialog juga masih terbatas. Sebagian masyarakat belum aktif menyampaikan aspirasi atau kendala yang dihadapi dalam pemenuhan gizi dan pengasuhan anak. Hal ini memperkuat temuan bahwa dialog tatap muka belum sepenuhnya inklusif, sebagaimana idealnya dalam praktik *collaborative governance*.

Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan merupakan elemen penting yang menentukan keberlanjutan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antarpemerintah lembang dan tenaga kesehatan relatif baik, karena adanya relasi kerja yang telah terbangun dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Aparat lembang (AP2) menyatakan bahwa pemerintah cenderung mempercayakan



aspek teknis pencegahan stunting kepada tenaga kesehatan, terutama dalam hal pendataan, edukasi gizi, dan pemantauan balita.

Kader posyandu memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat. Wawancara dengan kader posyandu (KP1) menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima informasi dari kader yang berasal dari lingkungan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa aktor lokal memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Kepercayaan ini mempermudah kader dalam mengajak masyarakat mengikuti kegiatan posyandu dan penyuluhan.

Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program pencegahan stunting belum merata. Sebagian masyarakat masih memandang stunting sebagai kondisi yang tidak dapat dicegah atau sebagai faktor keturunan. Informan masyarakat (MS1) mengungkapkan bahwa pemahaman tersebut membuat sebagian warga kurang antusias mengikuti program. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan belum sepenuhnya terbentuk secara menyeluruh, sehingga memengaruhi efektivitas kolaborasi.

Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen para aktor tercermin dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan pencegahan stunting. Pemerintah lembang menunjukkan komitmen melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi kegiatan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Aparat lembang (AP3) menjelaskan bahwa alokasi dana untuk kegiatan kesehatan harus dibagi dengan kebutuhan pembangunan lainnya, sehingga dukungan terhadap pencegahan stunting belum maksimal.

Tenaga kesehatan dan kader posyandu menunjukkan komitmen yang relatif tinggi dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Mereka secara rutin melaksanakan posyandu, pemantauan tumbuh kembang balita, serta penyuluhan gizi. Namun, kader posyandu (KP2) mengungkapkan bahwa keterbatasan insentif dan sarana pendukung sering memengaruhi motivasi dan konsistensi pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen aktor belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai.

Komitmen masyarakat dalam proses kolaborasi juga bervariasi. Sebagian masyarakat aktif mengikuti kegiatan dan memanfaatkan layanan kesehatan, sementara sebagian lainnya masih pasif. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan pemahaman tentang gizi menjadi faktor yang memengaruhi tingkat komitmen masyarakat.

Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama mengenai tujuan dan strategi pencegahan stunting menjadi elemen penting dalam *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah lembang dan tenaga kesehatan memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai stunting sebagai masalah kesehatan dan pembangunan. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan (TK2) menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi di tingkat masyarakat terkait penyebab dan dampak stunting. Sebagian masyarakat masih memaknai stunting secara sempit dan belum memahami keterkaitannya dengan pola asuh, sanitasi, dan asupan gizi. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa proses penyamaan persepsi belum berjalan optimal, sebagaimana disyaratkan dalam konsep *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Meskipun kolaborasi belum berjalan optimal, hasil penelitian menunjukkan adanya capaian sementara dalam pencegahan stunting. Peningkatan kehadiran balita di posyandu, bertambahnya pengetahuan ibu mengenai gizi, serta meningkatnya koordinasi antara pemerintah lembang dan tenaga kesehatan merupakan indikator positif dari proses kolaborasi yang telah berlangsung.

Namun, capaian tersebut belum secara signifikan menurunkan angka stunting. Hal ini menunjukkan bahwa *intermediate outcomes* yang dicapai masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan proses kolaborasi secara berkelanjutan. Tanpa peningkatan kualitas dialog, penguatan kepercayaan, konsistensi komitmen, dan penyamaan pemahaman bersama, kolaborasi berpotensi tidak menghasilkan dampak substantif terhadap penurunan stunting.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pencegahan stunting di Lembang Sa'dan Uluslu dilaksanakan melalui pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah lembang, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah terbentuk dan berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Dialog tatap muka antaraktor telah dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan kegiatan posyandu, tetapi intensitas dan keberlanjutannya masih terbatas. Pembangunan kepercayaan antaraktor relatif baik, terutama antara pemerintah lembang, tenaga kesehatan, dan kader posyandu, namun kepercayaan masyarakat terhadap program pencegahan stunting belum merata akibat perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai stunting.

Komitmen para aktor dalam proses kolaborasi terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan pencegahan stunting, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, sarana, dan dukungan anggaran. Pemahaman bersama mengenai tujuan dan strategi pencegahan stunting belum sepenuhnya selaras, khususnya di tingkat masyarakat, sehingga memengaruhi efektivitas kolaborasi. Capaian sementara berupa peningkatan partisipasi posyandu dan pengetahuan ibu tentang gizi menunjukkan adanya dampak positif dari kolaborasi, namun belum cukup kuat untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah lembang memperkuat peran sebagai koordinator kolaborasi melalui peningkatan intensitas dialog lintas sektor yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas kader posyandu perlu dilakukan melalui pelatihan dan dukungan operasional agar mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk membangun pemahaman bersama mengenai stunting sebagai masalah yang dapat dicegah. Penguatan komitmen seluruh aktor melalui dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi kunci agar *collaborative governance* dalam pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Lembang Sa'dan Uluslu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Anwar, T., Raji, H. F., Alita, R., Sulistiyorini, D., Maidartati, M., & Sihombing, D. R. (2024). *Stunting*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Adha, A. (2023). *Pola komunikasi kesehatan kader posyandu dalam program penanggulangan stunting di Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor* (Disertasi). Universitas Nasional.
- Afrida, C., Mustofa, A., & Susilo, K. D. (2024). Collaborative governance dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 71-82.



- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). Systematic review faktor risiko, penyebab, dan dampak stunting pada anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 88-94.
- Armayoga, B., Erlina, A. I. M. H., & Hijriyah, U. (2024). Implikasi hak anak dalam kandungan terhadap kebijakan kesehatan ibu dan anak. *Journal on Education*, 7(1), 7269-7277.
- Ashari, W. K., Adekantari, D. R., Juita, K., & Jaelani, M. A. (2024). Penanganan stunting oleh DPPKB Kota Mataram dalam pendekatan collaborative governance. <https://doi.org/10.61132/natural.v2i2.374>
- Astuti, D. D., Adriani, R. B., & Handayani, T. W. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam rangka stop generasi stunting. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 4(2), 156-162.
- Choliq, I., Nasrullah, D., & Mundakir, M. (2020). Pencegahan stunting melalui modifikasi makanan anak. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98-104.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8308>
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative governance: Konsep dan praktik dalam pengelolaan bank sampah*. Pustaka Rumah C1nta.
- Hadi, N. I. (2023). Challenges and opportunities of collaborative governance in addressing stunting: Lessons from Papua. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183>
- Hartini, S. (2023). *Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Bantul* (Disertasi). Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Hidete, M. J., Rorong, A., & Palar, N. (2022). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(114).
- Jannah, F. (2019). *Hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua terhadap kejadian stunting pada balita* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Komalawati, V., & Siahaan, Y. E. L. (2020). Pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Aktualita*, 3, 505-523.
- Kurniasih, D. (2023). Collaborative governance in stunting reduction: A case study in Banyumas District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1). <https://doi.org/10.31506/jap.v14i1.19423>
- Kusnadi, I. H. (2019). Jejaring collaborative governance dalam pencegahan HIV/AIDS. *International Journal of Demos*, 1(2), 204-231.



- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Levi-Faur, D. (Ed.). (2012). *The Oxford handbook of governance*. Oxford University Press.
- Nurdiansyah, I. L., Ramdhani, A., Rismayanti, E., & Adnan, Z. (2024). Faktor yang mempengaruhi stunting anak usia 6-23 bulan. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 30-39.
- Rehing, E. Y., Suryoputro, A., & Adi, S. (2021). Faktor yang mempengaruhi kunjungan ibu balita ke posyandu. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(2), 256-262.
- Siradj, A. M., & Sudarmono, S. (2024). Collaborative governance in addressing stunting in the Bajau community. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 66-84.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4364>
- Subarsono. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. (2015). *Menuju model resolusi konflik berbasis governance*. UNS Press.
- Tirayoh, J., Tulusan, F., & Pombengi, J. (2023). Implementasi program pencegahan stunting di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 608-619.
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., & Islam, N. (2025). *Collaborative governance*. Minhaj Pustaka Indonesia.
- Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74-84.